



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 13 Februari 2017

Halaman: 13

Semua Peristiwa Diunggah ke Youtube

■ Pengawas TPS Rekam Proses Pencoblosan dan Penghitungan Suara

Kecurangan dalam pemilihan kepala daerah biasanya diawali dari proses pemungutan suara di TPS
Iwan Ferdian

YOGYA, TRIBUN - Untuk meminimalisasi kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta akan merekam seluruh peristiwa dengan telepon seluler (ponsel). Hasilnya, nanti akan diunggah oleh para pengawas ke media sosial Youtube pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta, 15 Februari mendatang.

Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar-Lembaga Panwaslu Kota Yogyakarta, Iwan Ferdian menjelaskan, ada 794 orang pengawas atau sesuai dengan jumlah TPS, yang akan merekam semua peristiwa di TPS. Pengawas tersebut dibekali dengan alat perekam yang akan melaporkan semua kejadian di TPS.

"Mereka akan merekam beragam peristiwa di TPS. Mulai dari awal dimulainya pemungutan suara, proses penghitungan suara, hasil penghitungan suara, sampai kejadian-kejadian yang dianggap menonjol di TPS," ujar Iwan, Minggu (12/2).

Adapun hasil perekaman dikirim langsung melalui Panwas setempat, kemudian dilanjutkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Iwan juga menyebutkan jika hasil rekaman tidak ada yang diedit melainkan langsung dikirim ke Bawaslu, dan diunggah langsung oleh Bawaslu ke Youtube.

Dia menjelaskan, upaya perekaman ini merupakan salah satu perintah langsung dari Bawaslu RI. Pengawasan pilkada serentak ini juga dilakukan di semua daerah

● ke halaman 14

Semua Peristiwa Diunggah ke
● Sambungan Hal 13

yang melaksanakan pilkada. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam pemungutan suara. "Kecurangan dalam pemilihan kepala daerah biasanya diawali dari proses pemungutan suara di TPS," paparnya.

Rawannya masa tenang
Pihaknya juga melakukan pemantauan dan pengawasan dengan meminta semua pengawas TPS untuk berkeliling pada masa tenang. Iwan menyebutkan, kerawanan pada masa tenang itu di antaranya adalah, rawan kampanye terselubung yakni dengan penyebaran brosur atau alat kampanye. Selain itu juga ada kerawanan pada bag-bagi uang. Sementara, untuk konsolidasi partai pada masa tenang pun sempat terjadi perdebatan. Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini dilarang lantaran akan berpotensi disalahgunakan untuk kampanye.

Selain itu, pihaknya juga meminta 794 pengawas TPS untuk tetap cermat melihat beberapa kerawanan yang berpotensi muncul di masa tenang. Para pengawas yang sudah mendapat bimbingan teknis ini pun sudah dilatih untuk melaporkan kejadian.

"Bahkan, pada saat pemungutan suara para pengawas akan melaporkan segala kejadian secara online. Kami akan meng-upload secara online," ujarnya.

Pihak Panwaslu juga mengingatkan sejumlah pihak untuk tetap menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung. Pihak Panwaslu melakukan koordinasi dan konsolidasi tersebut dengan pihak kecamatan, kepolisian, dan TNI. Hal ini juga untuk terciptanya proses Pilkada yang aman dan damai tanpa pelanggaran.

Di sisi lain, Panwaslu juga mencatat keberadaan pemilih dari kalangan penyandang disabilitas di TPS menjadi salah satu faktor kerawanan akurasi daftar pemilih. Panwaslu setempat menyampaikan hasil pemetaan tahap pertama diketahui, 54 TPS memiliki potensi kerawanan pada aspek akurasi data pemilih, 51 TPS rawan ketersediaan logistik, 66 TPS rawan politik uang, enam TPS rawan keterlibatan penyelenggara negara, 199 TPS rawan profesionalitas penyelenggara dan 81 TPS rawan konflik.

Iwan juga menyebut, adanya pemilih yang merupakan difabel ini menuntut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk dapat memberikan pelayanan kepada pemilih dari penyandang disabilitas. Dia juga meminta KPPS jangan saling lempar tanggung jawab, agar para penyandang disabilitas ini bisa menggunakan hak pilihnya sebagai mana mestinya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan pada proses pemilihan yang dilakukan oleh pemilih difabel. Hal ini karena sangat rawan terjadinya pengurangan untuk mencoblos pasangan calon tertentu. (als)

- Panwas Kota Y
- KPU Kota Y
J
✓ Netral
✓ Biasa
✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005